



### Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014

Fajar Nur Hidayat<sup>1</sup>✉, Difa Reza Pahlevi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

<sup>2</sup>STIE Semarang, Jawa Tengah

---

#### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2016

Disetujui Maret 2016

Dipublikasikan Mei 2016

*Keywords:*

*effective, efficient, and retribution*

---

#### Abstrak

Untuk mengetahui apakah Kabupaten Pekalongan sudah efektif atau efisien dalam pengelolaan retribusi daerahnya maka penulis melakukan penelitian terhadap tingkat efektifitas dan efisiensi serta bagaimana gambaran kendala dalam pemungutannya dan potensi yang mampu dikembangkan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan jenis data yang digunakan berupa data *time series* (periode 2010-2014) dan data wawancara (berupa kuisioner dan wawancara mendalam). Hasil dari penelitian menunjukkan tingkat efektifitas yang baik dan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan retribusi daerah. Implementasi pemungutan retribusi masih banyak ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya serta masih kurangnya potensi retribusi daerah yang dapat digali dengan baik. Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan mampu meningkatkan target anggaran, juga memperketat/selektif dalam pengeluaran biaya retribusi serta pengelolaan pemungutan dilakukan secara tegas dan trasparan. Pemerintah Kabupaten juga harus mengevaluasi dan mendorong sektor retribusi yang berkembang dan terbelakang.

#### Abstract

*To find out if Pekalongan have been effective or efficient in the management of a local levy, the authors conducted a study of the effectiveness and efficiency as well as how the image of the constraints in the collection and the potential that is able to be developed. The analytical method used in this research is using quantitative descriptive analysis and the type of data used in the form of time series data (2010-2014) and the interview data (in the form of questionnaires and in-depth interviews). Results from the study showed a good level of effectiveness and a lack of efficient management levies. Implementation of fee collection are still many obstacles in its implementation and the lack of potential retribution that can be explored properly. Pekalongan regency government is expected to increase the budget targets, also tighten / selective in expenses levy and collection management is done explicitly and transparently. District government should also evaluate and encourage the sector that is developing and underdeveloped retribution*

---

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

ISSN 2252-6765

Ruang Jurnal Gedung L FE UNNES, Sekaran Gunungpati  
Semarang, 50229, Indonesia  
E-mail: fnhidayat89@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sangat penting dilakukan dalam pelaksanaan desentralisasi pada masa sekarang ini. Adanya kebijakan ekonomi daerah yang merubah sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik diharapkan mampu membuat daerah lebih mandiri dan terpacu dalam mengembangkan potensinya, karena tingkat desentralisasi akan mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah (Grisorio & Prota, 2015).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 tahun 2104 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 5). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundangundangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilakukan untuk mencapai aspek pertumbuhan wilayah (*efficiency*), pemerataan (*equity*) dan berkelanjutan (*sustainability*) yang lebih berdimensi lokal dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Dalam hal ini harus memainkan peran yang lebih serius dalam pembangunan sosial-ekonomi daerah (Vorontsov et al, 2015). Perubahan paradigma pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi menempatkan pemerintah daerah sebagai partner pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Menurut Kartasasmita (dalam Septian, 2008:24), mengatakan bahwa kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hakikat dari setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Tujuan pelaksanaan otonomi salah satunya memberikan peluang bagi kemandirian daerah untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pelimpahan kewenangan dalam bentuk desentralisasi fiscal. Berdasarkan asumsi bahwa

kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam kebijakan pemerintah sebagai penentu PDB (Gondor & Ozpenzo, 2014) maka, kemandirian fiskal menjadi hal yang sangat penting bagi daerah, terutama terkait dengan sumbangan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Peranan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sangat penting dalam era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti saat ini. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian, pajak daerah dan retribusi daerah dapat mendorong proses pembangunan di suatu daerah.

Menurut Halim dalam Erlangga A. Landiyanto (dalam Siagian, 2010:22), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan suatu otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk mengelolah pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas. Jadi keinginan daerah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi adalah legal dengan tetap memenuhi prinsip keuangan negara (perpajakan) agar pajak dan retribusi daerah tidak distortif dan menyebabkan ineffisiensi ekonomi.

Retribusi dipungut berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut pendapat para ahli (Mardiasmo,2003:101) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (dalam Josef Kaho Riwu, 2005:171) yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha

atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena telah memakai jasa yang telah disediakan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat yang telah membayar retribusi menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah.

**Tabel 1.**Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2010-2014 (Persen)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Pendapatan</b>					
<b>PAD</b>	<b>9,01%</b>	<b>8,81%</b>	<b>10,30%</b>	<b>12,00%</b>	<b>17,30%</b>
Pajak daerah	1,43%	1,63%	1,58%	2,32%	2,24%
Retribusi daerah	6,42%	6,37%	2,08%	1,02%	1,67%
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,29%	0,21%	0,37%	0,18%	0,24%
Lain-lain PAD yang sah	0,88%	0,60%	6,27%	8,47%	12,14%
<b>Dana Perimbangan</b>					
DBH	5,10%	3,44%	3,16%	2,21%	1,95%
DAU	65,36%	59,96%	60,90%	62,07%	56,40%
DAK	8,53%	6,90%	6,91%	4,89%	4,10%

Sumber: DJPK DEPKEU

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa persentase realisasi PAD selama tahun 2010 sampai 2014 Kabupaten Pekalongan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,2% persen, kemudian naik pada tahun berikutnya. Penurunan tersebut hanya sebesar 0,2% yang cukup kecil dibanding dengan peningkatannya. Proporsi persentase realisasi PAD yang naik tersebut tidak diimbangi dengan nilai pajak dan retribusi daerah, keduanya cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pajak daerah terlihat menurun dengan nilai 1,43% pada tahun 2010 yang kemudian naik pada tahun berikutnya. Persentase realisasi Retribusi daerah yang mempunyai nilai 6,42% pada tahun 2010, yang kemudian mengalami penurunan pada

tahun berikutnya, retribusi mengalami penurunan sangat sampai pada tahun 2014.

Penurunan retribusi daerah yang sangat tinggi mampu mempengaruhi perolehan pendapatan daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga terlihat menurun selama dua tahun, kemudian naik pada tahun 2012 dan menurun lagi pada tahun 2013 hingga nilai 0,18%. Berbeda dengan lain-lain PAD yang sah, selalu mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun 2012 sampai 2014. Sementara persentase Dana perimbangan terhadap total pendapatan cukup tinggi yaitu berkisar diatas 50%, meskipun dana perimbangan tersebut selalu menurun tiap tahunnya. DAU yang mempunyai nilai paling tinggi, yaitu hampir separuh dari nilai

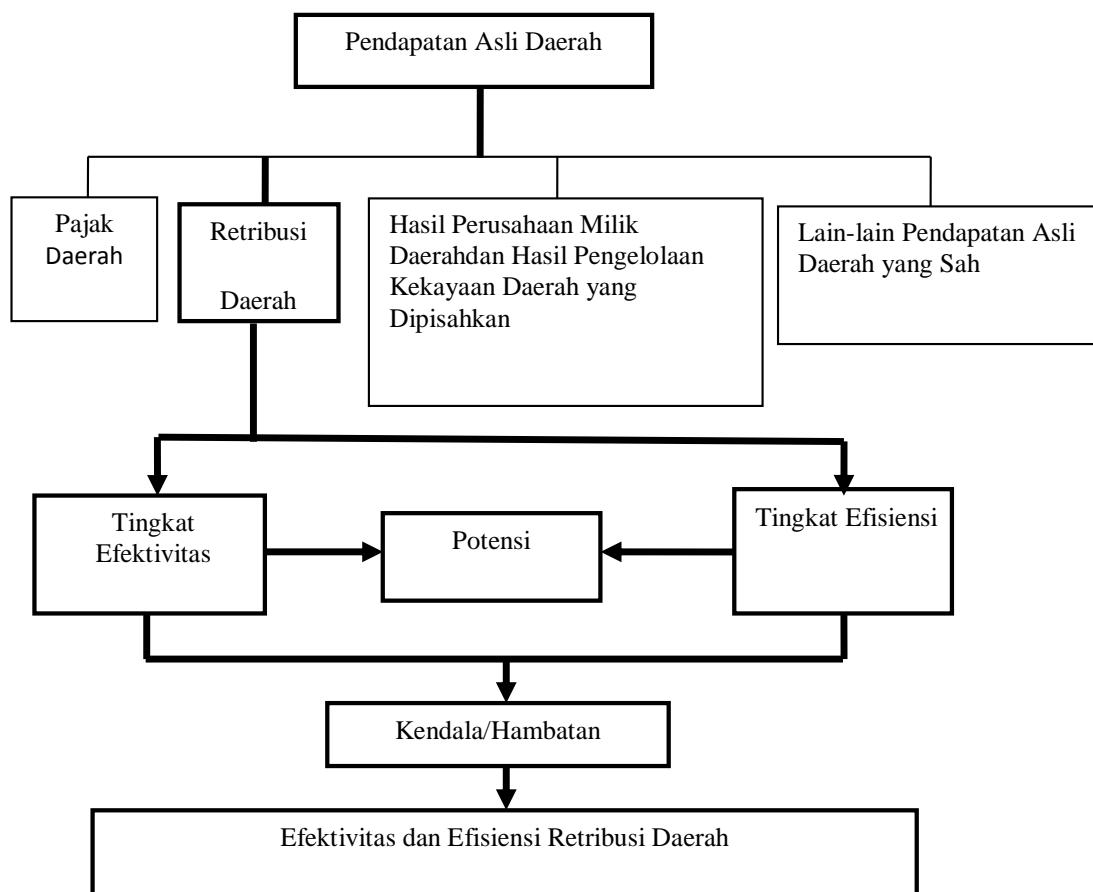
pendapatan, semntara nilai DBH mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. bahwa efektivitas yaitu seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga mampu untuk menganalisis serta mengambil langkah untuk kedepannya.

Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987:3) yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang

dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu.

Definisi potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatannya. Dengan demikian, jika pengertian potensi tersebut dikaitkan dengan potensi retribusi, maka potensi retribusi dapat diartikan sebagai suatu jumlah retribusi yang dapat diterima atau dipungut dan kemungkinan dapat dikembangkan. Kemampuan yang dapat dikembangkan ini sesuai dengan keadaan obyeknya dan diharapkan dapat dipungut dari wajib retribusi pada waktu tertentu atau sebagai suatu kemampuan maksimal dari dasar (basis) retribusi itu sendiri untuk dieksplorasi dan kemampuan optimal untuk mengeksplorasinya (Ekalaya dalam Ratwono, 2008:23).



**Gambar 1.**Kerangka Berpikir Penelitian

## Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2011:159). Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis pada gambar di atas, hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Penerimaan Retribusi daerah Kabupaten Pekalongan Efektif  
H2 : Penerimaan Retribusi daerah Kabupaten Pekalongan Efisien

## METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKD) Kab. Pekalongan dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang khususnya pada tahun 2010 sampai 2014. Data primer digunakan dalam penelitian ini sebagai data tambahan yang diperoleh peneliti dengan cara mengamati tindakan para informan dan mewawancara beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2002:321). Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), DPPKAD Kabupaten Pekalongan dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Serta data primer dengan melakukan observasi langsung melalui wawancara mendalam terhadap instansi terkait.

a. Efektivitas Retribusi  
Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat

digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan.

#### b. Efisiensi Retribusi

Efisiensi retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan retribusi dengan realisasi penerimaan retribusi.

c. Biaya Pemungutan Retribusi

Biaya pemungutan retribusi merupakan biaya yang di keluarkan untuk proses retribusi selama periode tertentu

d. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Merupakan suatu perhitungan rasio untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap PAD.

#### e. Pertumbuhan Retribusi daerah

Pertumbuhan retribusi daerah merupakan peningkatan pendapatan penerimaan daerah melalui retribusi daerah dari periode.

Efektivitas Retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Efektivitas retribusi daerah ini dapat diukur dengan menggunakan rumus di bawah ini (Puspitasari, 2014:46) :

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas retribusi daerah adalah:

**Tabel 2**Klasifikasi Kriteria nilai Efektivitas Retribusi Derah

Ketebas Deras	
Percentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
91 -100%	Efektif
81 – 90%	Cukup Efektif
61 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (Dalam Puspitasari, 2014:46)

Efisiensi retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase perdagangan biaya pemungutan retribusi dengan realisasi penerimaan retribusi.

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan di analisis dengan rasio efisiensi retribusi daerah dengan rumus sebagai berikut(Puspitasari, 2014:46):

$$Efisiensi = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

**Tabel 3.**Klasifikasi Kriteria nilai Efisiensi Retribusi Daerah

Percentase	Kriteria
Diatas 5%	Tidak Efisien
5%	Efisien
Kurang dari 5%	Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (Dalam Puspitasari, 2014:46)

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi retribusi daerah yang menggunakan bidang kesehatan adalah pengelolaan retribusi daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pemungutan tidak melebihi 10%.

**Tabel 4.**Klasifikasi Kriteria nilai Efisiensi Retribusi Kesehatan Daerah

Percentase	Kriteria
Diatas 10%	Tidak Efisien
10%	Efisien
Kurang dari 10%	Efisien

Sumber: UU Kesehatan tahun 2009 No. 36

Matriks ini menggambarkan secara jelas bagaimanapeluang dan ancaman internal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat setkemungkinan alternatif strategis, seperti pada Tabel 5 berikut :

**T 1.15 Mobile SWOT**

		Peluang (O)	Ancaman (T)
		Faktor Internal	
Faktor Eksternal			
Kekuatan (S)		Comparative Advantage (SO)	Mobilization (ST)
Kelemahan (W)		Invesment Divesment (WO)	Damage Control (WT)

---

Sumber: Freddy Rangkuti, 2008

Matriks potensi merupakan skala penilaian terhadap potensi Retribusi Daerah. Matriks potensi digunakan untuk mengukur perbedaan potensi Retribusi Daerah, yang dinilai dari pertumbuhan dan kontribusi Retribusi Daerah. Pengukuran potensi Retribusi Daerah dapat menggunakan matriks potensi, yang di dalamnya terdapat empat kategori hasil pengukuran (Sari, 2013:10):

1. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Merupakan suatu perhitungan rasio untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap PAD.
  2. Pertumbuhan Retribusi daerah  
Pertumbuhan retribusi daerah merupakan peningkatan pendapatan penerimaan daerah melalui retribusi daerah dari periode ke periode.

**Tabel 6.**Matriks Potensi berdasarkan Kriteria tingkat Pertumbuhan dan Kontribusi

Pertumbuhan		Kontribusi	
		Potensial	Tidak Potensial
	Positif	Prima	Berkembang
	Negatif	Potensial	Terbelakang

Sumber: Ad, A dan Sulistyowati, 2013:59

Empat kategori hasil pengukuran:

## 1. Prima

Retribusi Daerah termasuk dalam kategori prima, jika tingkat pertumbuhan dan kontribusinya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang besar (sangat potensial) bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat pertumbuhannya semakin meningkat atau cenderung stabil.

## 2. Potensial

Retribusi Daerah termasuk dalam kategori potensial, jika tingkat pertumbuhannya rendah namun kontribusinya tinggi. kategori menandakan kontribusi cukup besar namun pengelolaannya belum baik.

## 3. Berkembang

Retribusi Daerah termasuk dalam kategori berkembang, jika tingkat pertumbuhan tinggi namun kontribusinya rendah.

## 4. Terbelakang

Retribusi Daerah termasuk dalam kategori terbelakang, jika tingkat pertumbuhan dan

kontribusinya rendah. Kategori ini menandakan belum baiknya pengelolaan Retribusi Daerah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Efektifitas Retribusi**

Secara keseluruhan pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Pekalongan selama tahun 2010-2014 sudah cukup efektif karena memiliki rata-rata tingkat efektivitas 100%. Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa retribusi daerah mempunyai nilai yang baik yaitu pada tahun 2010 mempunyai nilai 92,83 % yang kemudian naik menjadi 108,16% tahun 2011. Penurunan juga terjadi pada tahun 2012 menjadi 95,08%, kemudian naik seterusnya menjadi 105,95 pada tahun 2014. Melihat hasil efektifitas yang naik turun atau fluktuatif, mengindikasikan bahwa terjadi gejolak atau permasalahan dalam penerimaan retribusi daerah Kabupaten Pekalongan.

**Tabel 7.**Efektifitas Retribusi Kab. Pekalongan 2010-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2010	51.842.100.250	48.127.352.464	92,83	Efektif
2011	54.339.585.581	58.776.290.304	108,16	Sangan Efektif
2012	24.324.515.000	23.129.015.003	95,08	Efektif

2013	11.361.629.323	12.628.888.224	111,15	Sangan Efektif
2014	23.298.233.222	24.685.432.930	105,95	Sangan Efektif
Jumlah			513,17	
Rata-rata			102,63	Sangan Efektif

Sumber :DPPKD Kabupaten Pekalongan di Olah dalam angka 2014

Secara umum nilai efektifitasnya mengalami kenaikan bahkan nilainya rata-rata 100%. Meskipun tingkat efektivitas Retribusi Daerah tergolong sangat efektif, namun kondisi tersebut belum dapat mengambarkan kondisi riil tingkat kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut terjadi karena tingkat efektivitas dihitung berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasinya, namun pada kenyataannya target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih sangat fluktuatif,

sehingga meskipun terlihat efektif namun pada tahun-tahun tertentu tingkat kontribusi yang diberikan justru rendah. Kondisi tersebut mencerminkan pada penerimaan retribusi perjenis yang kurang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Perbedaan inilah yang mampu menyebabkan fluktuatif dalam pemungutan retribusi daerah, sehingga mampu menghambat laju pertumbuhan sector-sektor retribusi daerah.

**Tabel 8.**Efisiensi Retribusi Kab. Pekalongan 2010-2014

Tahun	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2010	75.000.000	5.516.428.539	1,36	Efisien
2011	75.000.000	5.768.112.516	1,30	Efisien
2012	401.688.800	6.777.392.211	5,93	Tidak Efisien
2013	404.467.552	7.753.832.876	5,22	Tidak Efisien
2014	449.342.475	7.286.354.669	6,17	Tidak Efisien
Rata-rata			3,99	Efisien

Sumber :DPPKD Kabupaten Pekalongan di Olah dalam angka 2014

Terlihat pada tabel 9 bahwa tingkat efisiensi mengalami fluktuasi yang kurang stabil, hal tersebut terlihat pada tahun 2010 yang mempunyai nilai 1,36 menurun pada tahun 2011, yang kemudian meningkat tajam pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 menurun dan pada tahun 2014 malah mengalami peningkatan yang cukup tinggi sampai 1 persen. Berdasarkan

kriteria efisiensi yang digunakan, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan sangat tidak efisien, hal tersebut terlihat dalam lima tahun hanya 2 tahun saja yang mempunyai persentase yang efisien sedangkan lainnya tidak, berarti banyak terjadi ketidaksesuaian antara biaya dengan penerimaan yang diperoleh.

**Tabel 9.**Efisiensi Retribusi Kesehatan Kab. Pekalongan 2010-2014

Tahun	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2010	15.034.794.880	42.610.923.925	35,28	Tidak Efisien
2011	23.820.921.147	53.008.177.788	44,94	Tidak Efisien
2012	7.456.043.270	16.351.622.792	45,60	Tidak Efisien
2013	1.739.438.705	4.875.055.348	35,68	Tidak Efisien
Tahun	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2014	13.299.322.530	17.399.078.261	76,44	Tidak Efisien
Rata-rata			47,59	Tidak Efisien

Sumber :DPPKD Kabupaten Pekalongan di Olah dalam angka 2014

Sementara pada retribusi kesehatan sendiri pada tabel 9 terlihat bahwa selama lima tahun terakhir mempunyai nilai yang tidak efisien, rata-rata mempunyai nilai 47,59. Nilai persentase yang begitu besar dalam retribusi kesehatan memang tidak bisa menjadi patokan karena mengingat biaya kesehatan yang begitu besar. Selama tiga tahun pertama persentase mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu tahun 2010-2012. Tahun 2013 sempat mengalami penuruna, tapi meningkat tajam pada tahun 2014. Nilai ketidakefisienan yang cukup besar terjadi pada tahun 2014, sedangkan yang paling kecil 2010. Melihat nilai tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Pekalongan dalam mengelola retribusi kesehatan sangat tidak efektif, karena hampir tiap tahunnya mempunyai nilai diatas 30%.

#### Analisis Kendala atau Hambatan

Berdasarkan wawancara dan analisis melalui metode SWOT, penulis dapat menemukan hal-hal yang menyebabkan pihak pemerintah daerah mengalami kendala atau hambatan dalam pemungutan retribusi. Berikut hasil wawancara menggunakan analisis SWOT yang di lakukan oleh penulis di Kabupaten Pekalongan:

#### Faktor Internal

##### a. Kekuatan (*Strength*)

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di Kabupaten memiliki dua tipe pendekatan strategi yang diterapkan yaitu melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Hal ini dimaksudkan agar strategi dapat terimplementasi secara luas dan merata dengan sasaran yang tepat.

##### b. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam data yang diperoleh dari lapangan mengenai kelemahan dari strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menghambat implementasi pemungutan retribusi adalah kuantitas pegawai belum memadai, sumber anggaran yang relatif kurang, Sistem informasi dan data yang belum optimal, Pemasaran dan promosi belum optimal terhadap beberapa retribusi tertentu, ketegasan peraturan dalam pelaksanaan retribusi masih kurang, terdapat gaji dan insentif yang tidak sesuai dengan pekerjannya, tarif retribusi yang kadang tidak sesuai dengan yang tertulis di PERDA dan keterbatasan fasilitas penunjang dalam pemungutan retribusi. Kabupaten Pekalongan juga masih lemah dalam mengelola SDM yang berkualitas, sarana dan prasarana seperti aksesibilitas, akomodasi dan penunjang lainnya masih harus dibenahi.

**Faktor Eksternal****a. Peluang(*Opportunity*)**

Dari hasil penelitian dan penyajian data yang penulis lakukan ditemukan beberapa peluang-peluang yang dimungkinkan dapat di aplikasikan di Kabupaten Pekalongan. Berikut beberapa peluang yang timbul dari luar sehingga mampu menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah. Peluang tersebut seperti, adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kearifan budaya lokal yang mampu mengelola SDA, adanya sinkronisasi program dinas dengan program LSM, adanya sinergitas antar SKPD, keterbukaan masyarakat dalam pemungutan retribusi, dibukanya objek retribusi baru yang mampu untuk meningkatkan penerimaan, dan

perkembangan fasilitas yang sudah terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat.

**b. Ancaman (*Threat*)**

Dengan diketahuinya peluang dalam suatu strategi tentu hal tersebut juga dapat menimbulkan ancaman atau dampak negatif dari peluang tersebut. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan juga menemukan dampak negatif atau ancaman yang dapat terjadi jika peluang dalam pemungutan retribusi. Adapun ancaman-ancaman yang dapat terjadi menurut penelitian penulis di lapangan adalah kesadaran masyarakat yang cukup rendah, peraturan dan tarif yang cukup sulit dipahami oleh masyarakat, ketidaksesuaian peraturan retribusi dengan implementasinya, penerimaan retribusi yang tidak sampai kas daerah, dan ketidak jujuran masyarakat dalam pembayaran retribusi.

**Tabel 10.** Matriks Potensi Retribusi Kab. Pekalongan 2010-2014

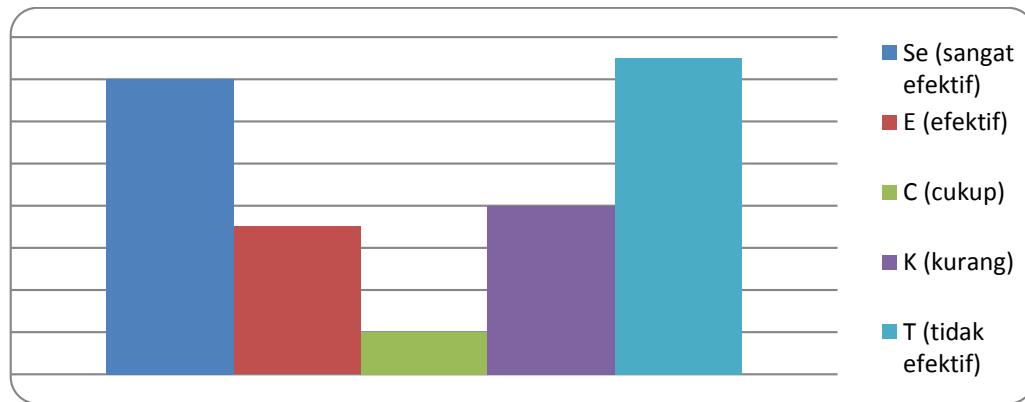
Tahun	<i>Kontribusi</i>	<i>Laju Pertumbuhan</i>	<i>Kriteria</i>
2010	Potensial	Positif	Prima
2011	Potensial	Positif	Prima
2012	Tidak Potensial	Negatif	Terbelakang
2013	Tidak Potensial	Negatif	Terbelakang
2014	Tidak Potensial	Positif	Berkembang

Sumber :DPPKD Kabupaten Pekalongan di Olah dalam angka 2014

**Efektifitas Retribusi**

Tingkat efektifitas retribusi Kabupaten pekalongan sangat bervariasi, pada tahun 2010 mempunyai kriteria yang efektif atau dengan nilai 92,8 persen, kemudian pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 108,1 persen

dengan nilai sangat efektif. Pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 95,8 persen, kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan sehingga mempunyai nilai yang sangat efektif. Tingkat efektifitas per sektordi Kabupaten Pekalongan dapat dilihat dalam grafik berikut:



**Grafik 1.**Kriteria Efektifitas Retribusi per Sektor Kab. Pekalongan 2010-2014

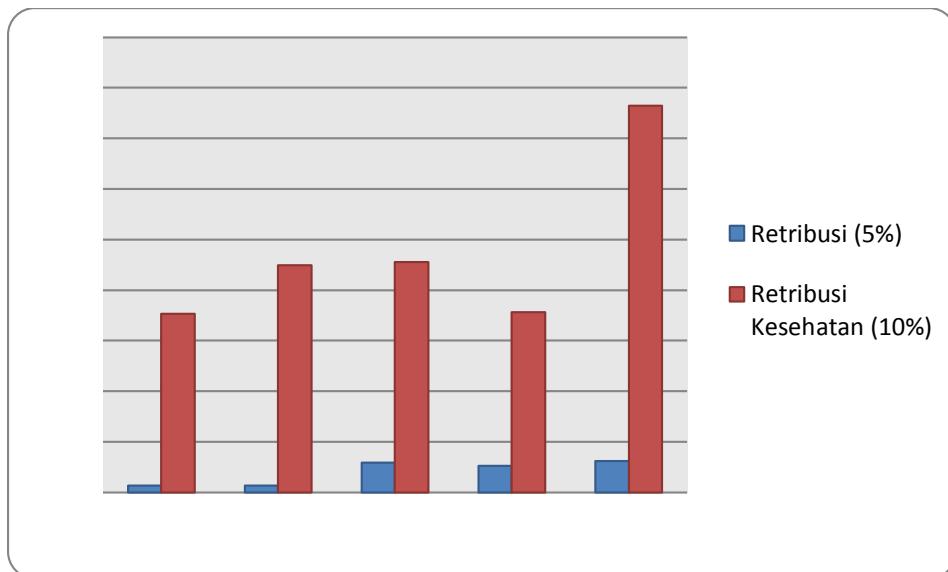
Sumber :DPPKD Kabupaten Pekalongan di Olah dalam angka 2014

Melihat hasil per sektor retribusi daerah Kabupaten Pekalongan selalu meningkat tiap tahunnya, sehingga keseluruhan sektor retribusi mengalami peningkatan yang positif, peningkatan tersebut membuat pencapaian target sesuai dengan realisasi, yang di buktikan dengan rata-rata nilai sangat efektif. Pada beberapa jenis retribusi yang mengalami penurunan bahkan mempunyai nilai yang kurang baik atau hampir sebagian jenis retribusi mempunyai nilai yang kurang baik atau bahkan tidak efektif.

Terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menentukan target sudah cukup efektif, walaupun ada beberapa jenis retribusi yang tidak sesuai dengan target.

#### **Efisiensi Retribusi**

Secara umum efisiensi retribusi daerah non kesehatan Kabupaten Pekalongan menunjukkan tingkat rata-rata efisiensi sebesar 3,99%. Dengan demikian, berdasarkan kriteria yang ditetapkan diatas maka retribusi berada pada posisi efisien.



**Grafik 2.**Kriteria Efisiensi Retribusi Kab. Pekalongan 2010-2014

Sumber :DPPKD Kabupaten Pekalongan di Olah dalam angka 2014

Berdasarkan grafik 2 terlihat tingkat efisiensi retribusi non kesehatan dan kesehatan, pada tahun 2010 retribusi non kesehatan mempunyai nilai persentasi sebesar 1,36 persen yang berarti efisien, namun pada tahun 2012 terlihat mengalami peningkatan dengan nilai 5,93 persen. Peningkatan tersebut menggambarkan ketidakefisienan yang dilakukan pemerintah daerah. Pada tahun 2014 mempunyai nilai sebesar 6,17 persen, hal ini terlihat bahwa ketidakefisienan terus berlanjut hingga tahun 2014. Pengeluaran biaya pemungutan dalam pelaksanaan retribusi daerah di Kabupaten Pekalongan cukup tinggi, karena setiap tahun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010.

**Tabel 11.**Kendala Pemungutan Retribusi Kab. Pekalongan 2010-2014

NO	Kendala/Hambatan
Petugas	Jumlah petugas yang belum memadai SDM petugas yang kurang mencukupi Masih terjadi penggelapan dalam pemungutan retribusi
	Ketidaktahuan petugas dalam pemungutan retribusi tertentu sehingga membuat objek retribusi tidak terpungut dengan baik Gaji atau insentif yang tidak sesuai Tanggungjawab yang kurang sehingga mampu menyebabkan penyalahgunaan wewenang Pelayanan yang kurang memadai
2 Masyarakat	Keterbatasan informasi tentang retribusi dan peraturannya Kesadaran masyarakat kurang terhadap retribusi Partisipasi masyarakat dalam retribusi daerah sangat kecil Masyarakat lebih suka menggunakan fasilitas swasta Penarikan “keamanan” oleh oknum di luar Dinas (preman) yang menyebabkan obyek retribusi menurun kemampuannya untuk membayar retribusi daerah, misal retribusi pasar

3	Peraturan	<p>Peraturan daerah tentang retribusi yang selalu berubah-ubah</p> <p>Keterbatasan penginformasian peraturan tentang tarif dan peraturan lainnya</p> <p>Ketidak sesuai peraturan retribusi dengan kenyataan di lapangan</p> <p>Ketegasan peraturan yang masih lemah dalam implementasinya</p> <p>Belum maksimalnya potensi retribusi daerah yang digali secara optimal</p>
4	Fasilitas	<p>Kurang memadai fasilitas pendukung dalam operasional retribusi</p> <p>Tempat dan sarana pemungutan yang masih terbatas</p> <p>Sulitnya memperoleh fasilitas yang lebih modern</p> <p>Kurang berkembangnya fasilitas yang ada</p> <p>Jarak fasilitas yang cukup jauh, hal ini terjadi pada daerah yang sulit dijangkau</p> <p>Pencatatan retribusi masih ada beberapa yang manual sehingga data sering hilang dan sering tidak jelas.</p>

### Potensi Retribusi

Dari hasil analisis menggunakan matriks potensi pada table 9 dapat diketahui bahwa rata-rata sektor-sektor Retribusi Daerah telah dipungut dengan cukup efektif, namun hampir seluruh sektor justru memiliki tingkat kontribusi dan pertumbuhan yang rendah. Dari 46 sektor yang dipungut, hanya terdapat empat sektor yang berada pada kategori Retribusi Prima, yaitu Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah, Ret. Pelayanan kesehatan, Ret. Pelayanan Pasar dan Ret. Pengendalian menara telekomunikasi.

Kabupaten Pekalongan selama tahun 2010-2014 mengalami kondisi yang kurang baik pada tahun-tahun tertentu (table 11), maka berikut peneliti sajikan gambaran mengenai bagaimana kondisi potensi yang dimiliki masing-masing sektor Retribusi Daerah selama tahun 2010-2014 menggunakan matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi. Prima, jika tingkat pertumbuhan

positif dan kontribusinya potensial; potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya potensial; berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak potensial, dan terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial.

### SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tingkat efektifitas pemungutan Retribusi di Kabupaten Pekalongan tahun 2010-2014 termasuk kategori kurang efektif dan tingkat efisiensi pemungutan retribusi di Kabupaten Pekalongan tahun 2010-2014 tidak efisien, masih ditemui banyak kendala dan hambatan dalam pemungutan retribusi, serta masih banyaknya jenis retribusi yang terbelakang, sehingga kurang untuk dikembangkan. Sebaiknya, pemerintah

Kabupaten Pekalongan harus meningkatkan target lagi agar mendorong peningkatan pendapatan, mengurangi biaya pemungutan retribusi agar lebih selektif dalam pengeluaran biaya, memperbaiki sistem dalam pemungutan baik dalam segi intern dan ekstern, serta lebih melihat pada potensi yang mampu dikembangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. & Sulistyawati, , 2013. Analisis Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 - 2010. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 8.
- BPS. 2009-2013. Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. BPS Jawa Tengah Semarang.
- BPS. 2009-2013. Jawa Tengah Dalam Angka Tahun. BPS Provinsi Jawa TengahSemarang.
- DPPKD. 2010-2014. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan. DPPKD Kabupaten Pekalongan.
- Frediyanto, Yanuar. 2010. "Analisis Kemampuan Keuangan Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah Kebijakan Otonomi daerah". *Skripsi*. UNDIP.
- Grisorio, M.J. & Prota, F., 2015. The Short And The Long Run Relationship Between Fiscal Decentralizationand Public Expenditure Composition In Italy. *Economics Letters*, 130, pp.113-16.
- Gondor, M. & Ozpence, O., 2014. An Empirical Study On Fiscal Policy In Crises Time: Evidence From Romania And Turkey. *Procedia Economics and Finance* , 15, pp.975 - 984.
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Dalam negeri No. 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya pemungutan Pajak Daerah.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Mulyamah. 1987. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Yudhistira.
- Nurjannahadjin. 2008. "Analisis Kemandirian Fiskal diera ottonomi daerah (studi kasus Propinsi Sulawesi Tengah)".*Thesis*. UNDIP.
- P Ratwono, Andika Budi. 2008. "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta. *Skripsi*.IPB.
- Puspitasari, Elfayang. R.A. 2014. "Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi.
- Rosalina, E. (2015). Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001-2013. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1).
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT Refika Adimata.
- Septian, Bagus. 2008. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat. Bogor : IPB Bogor.
- Siagian, Altito R. 2010. "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah (studi kasus Propinsi Jawa Barat)".*Skripsi*. UNDIP.
- Suharsimi, A. 2002. Metode Penelitian. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sutrisno, D. (2013). Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel, Dan Pdrb Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Jurnal*, 2(4).
- Taufiqurrohman, M. (2014). Strategi Pengembangan Pariwisata Serta Kontribusinya Pada Penerimaan Retribusi Kota Pekalongan. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Vorontsov, D., Shikhalev, A. & Ksenia Semushina, 2015. Using Of Cultural Heritage In The Socio-Economic Development Strategy Of The Eu Regions. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 188, pp.163-69.